

KEYNOTE ADRESS

RAFENDI DJAMIN
WAKIL INDONESIA UNTUK AICHR

Workshop Penguatan Komunitas Sosio-Kultural ASEAN 2015: Perumusan Indikator Capaian dari *Strategic Measures* dalam Attendant Document ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)

“Pengarusutamaan HAM dalam Komunitas Sosial Budaya ASEAN Paska-2015”

Yth Bapak/Ibu

Yth [...]

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh, shalom, om swastyastu

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua

Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada *Parahyangan Center for International Studies* (PACIS) FISIP UNPAR atas terselenggaranya Workshop ini. Selamat juga saya sampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Friedrich Ebert Stiftung Indonesia karena telah memberikan dukungan moril dan materil untuk pelaksanaan event penting ini.

Saya sangat berterima kasih atas undangan pihak panitia penyelenggara kepada saya, dengan diundangnya saya pada acara yang khusus membahas suatu pilar Komunitas Sosial-Budaya ASEAN ini terdapat sebuah pemahaman bahwa AICHR sebagai “organ” ASEAN yang lahir dari pilar politik dan kemanan ASEAN mempunyai peran penting dalam koordinasi kerjasama HAM di ASEAN.

Tahun ini adalah tahun terakhir saya sebagai wakil Indonesia di Komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN (AICHR). Setelah menjalankan mandat selama lebih dari 5 tahun, yaitu menjalankan kepemimpinan Indonesia dalam pemajuan HAM di kawasan ASEAN. Berbagai tantangan, pelajaran dan peluang saya temui selama perjalanan saya di Komisi HAM ASEAN tersebut.

Topik yang kita angkat kali ini yakni **“Penguatan Komunitas Sosio-Kultural ASEAN 2015: Perumusan Indikator Capaian dari *Strategic Measures* Dalam Attendant Document ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)”** – merupakan topik yang sangat relevan dan sudah semestinya menjadi perhatian kita bersama. Dipilihnya topik ini sebagai tema diskusi, menunjukkan bahwa UNPAR, khususnya PACIS sebagai lembaga pendidikan tinggi, tidak saja merupakan tempat dimana

para mahasiswa, peneliti dan pengajar berjibaku dengan teori semata, namun juga tempat dimana mereka juga mengikuti dan memonitor dinamika perubahan masyarakat dan negara, di ASEAN. Bahkan, mereka jg berkontribusi untuk memberikan ide-idenya dalam proses pembangunan komunitas ASEAN yang mampu menjawab tantangan-tantangan baru.

Secara khusus, saya akan secara spesifik memaparkan tentang tantangan dan peluang mewujudkan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC) serta bagaimana dengan menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) seharusnya kita membangun Visi ASCC 2025 ke depan.

Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian,

18 tahun yang lalu, atau tepatnya tahun 1997, para pemimpin ASEAN mulai secara lebih konkret berbicara tentang bagaimana mereka melihat masa depannya hingga, paling tidak, sampai tahun 2015 ini, tahun dimana kita sekarang berada diruangan ini bersama-sama. VISI ASEAN termaktub didalam apa yang disebut dengan **“ASEAN VISION 2020”** yang kemudian dipercepat pencapaiannya menjadi **ASEAN VISION-2015**.

Visi tersebut berbunyi sebagai berikut:

ASEAN sebagai orkestra dari negara-negara Asia Tenggara, yang beroreantasi keluar, yang hidup dalam perdamaian, stabilitas dan kemakmuran, terikat bersama dalam kerjasama dalam pembangunan yang dinamis didalam sebuah komunitas masyarakat yang saling peduli.

Visi tersebut mungkin cukup abstrak, sehingga kemudian untuk menkonkretkan visi tersebut, ASEAN membuat Peta Jalan atau Roadmap untuk Komunitas ASEAN 2009-2015 yang terdiri dari Cetak Biru Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, (APSC), Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (ASCC). Roadmap ini didasari pada sebuah kerangka institusi dan hukum yang mengikat (*legally binding instrument*) yaitu Piagam Asean atau **ASEAN CHARTER** yang diratifikasi oleh semua negara anggota ASEAN pada tahun 2008.

Dalam rentang waktu 18 tahun tersebut, ada sebuah kemajuan signifikan yang telah dibuat ASEAN yang menjadi pembeda antara ASEAN lama dengan ASEAN baru, yakni diakuinya Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental sebagai prinsip-prinsip yang mengikat diantara negara-negara ASEAN. Karena itupula lah, sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 14 Piagam ASEAN, ASEAN kemudian

membentuk sebuah badan HAM ASEAN, yang menjadi badan HAM regional pertama dikawasan Asia Pasifik. Perlu lebih dari 40 tahun bagi ASEAN sejak ia berdiri untuk dapat mengakui HAM dan membentuk sebuah badan HAM regional.

Sejak di bentuknya AICHR dari tahun 2009, ada banyak tantangan yang kita hadapi yang disebabkan karena beberapa faktor. Beberapa diantaranya adalah perbedaan tingkat pemahaman dan penerimaan negara-negara ASEAN Terhadap nilai dan norma HAM dan kebebasan fundamental. Namun persoalan ini bisa dihadapi dengan diadopsinya Deklarasi HAM ASEAN atau *ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)* pada tahun 2012 yang menjadi referensi utama, atau *basic document* atas kesepakatan dan kesepakatan 10 negara ASEAN tentang apa itu Hak Sipil dan Politik, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hak atas Pembangunan, Hak atas Perdamaian serta Kerjasama dalam Pemajuan dan Perlindungan HAM.

Namun apakah dengan adanya pengakuan atas nilai dan norma HAM universal, berdirinya lembaga HAM ASEAN, dan diadopsinya Deklarasi HAM ASEAN, maka persoalan perbedaan pemahaman dan penerimaan di kalangan negara anggota ASEAN tersebut menjadi selesai? Tentu saja tidak. Dia baru permulaan dari sebuah proses pembelajaran, tarik-menarik antara unsur progresif dan unsur yang masih terjebak dalam alam pikiran partikularisme HAM.

Bapak/Ibu dan hadirin sekalian,

Dengan terintegrasinya ASEAN menjadi satu masyarakat ekonomi, politik, sosial dan budaya, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan rakyat ASEAN semakin besar.

Karena itulah, kita mesti melihat bahwa **Visi ASEAN 2025 (ASEAN Vision 2025)** dan Dokumen pendukungnya yang saat ini sedang dibahas oleh *High-Level Task Force on the ASEAN Vision Post-2015 (HLTF)* sebagai sebuah strategi kebijakan ASEAN dalam mengatasi isu-isu spesifik yang ada di masyarakat.

Visi ASEAN 2025 sebagai sebuah cetak biru fase kedua ASEAN Community 2016-2025 adalah sebuah strategi kebijakan yang mesti berevolusi sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, sesuai dengan prinsip anti non-diskriminasi, kesetaraan, dan good governance – yang pada akhirnya bertujuan untuk melindungi rakyat ASEAN dari dampak-dampak yang tidak diharapkan dari proses integrasi regional.

Visi ASEAN 2025 sebagai alat untuk pelaksanaan dari Piagam ASEAN juga mesti merumuskan kewajiban-kewajiban negara-negara ASEAN dalam mencegah, mengurangi dan menanggulangi dampak negatif dari proses integrasi masyarakat

ASEAN. Dengan demikian, kita harus dapat mengidentifikasi dampak-dampak yang akan dihadapi baik oleh individu, kelompok-kelompok, terutama mereka yang terpinggirkan karena proses integrasi yang tengah berlangsung.

Bapak/Ibu dan hadirin sekalian,

Saat ini *HLTF on ASEAN Vision Post 2015* sedang menyusun Visi barunya tentang ASEAN dimasa depan beserta dengan dokumen-dokumen pendukungnya.

Visi ASEAN tersebut, yang pertamanya harus dapat melihat kembali kebutuhan-kebutuhan atau persoalan-persoalan sosial dan budaya di kawasan.

Kita memerlukan sebuah Visi ASEAN beserta dokumen-dokumen pendukungnya dengan sebuah inspirasi dimana seluruh masyarakat ASEAN bisa hidup lepas dari kemiskinan dan rasa lapar, eksploitasi, kemiskinan dan diskriminasi termasuk bebas dari kekerasan berdasarkan gender, dan dapat menikmati akses yang layak untuk pengembangan manusia secara total terlepas dari ras, agama, disabilitas, bangsa, jenis kelamin, identitas gender, bahasa dan latar belakang sosial budaya.

Khusus untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, saya akan menggaris-bawahi beberapa elemen penting dari list panjang yang mesti masuk kedalam Visi ASEAN yang baru tersebut, antara lain:

Sebuah komunitas dimana rakyat kita mendapatkan akses yang adil dalam pelayanan dan perlindungan sosial, terhadap perempuan, anak-anak, buruh migran – terlepas dari status imigrasi mereka – para penyandang disabilitas, orang dengan orientasi seksual dan identitas gender, orang yang hidup dengan HIV, kebangsaan etnis, pengungsi, orang tanpa kewarganegaraan, korban perdagangan, dan kelompok rentan lainnya, antara lain lewat:

- a. Meningkatkan akses pelayanan sosial utk semua;
- b. Adanya pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, air dan energi yang memenuhi kebutuhan dasar yang terjangkau;
- c. Meningkatkan pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk hak-hak perempuan;
- d. Meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak-hak anak;
- e. Perlindungan yang luas terhadap buruh migran terlepas dari status imigrasi mereka;
- f. Pemajuan dan perlindungan terhadap orang-orang dengan disabilitas;
- g. Meningkatkan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan;
- h. Terlembagakannya dialog sosial antara badan-badan ASEAN dengan

para pemangku kepentingan;

- i. Menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi pencapaian pekerjaan yang stabil.

Untuk dapat merealisasikan visi khusus pada pilar ASCC tersebut, negara-negara anggota mesti berkomitmen untuk memobilisasi sumber-sumber keuangan, termasuk dari para Mitra Wicara, negara-negara donor, organisasi internasional, sektor swasta, dan organisasi pemerintahan.

Bapak/Ibu, Hadirin yang saya hormati,

Tentu kita tidak ingin ASEAN berhenti dalam perumusan norma saja. Perlu ada partisipasi dan kontrol publik terhadap apa yang sedang dirumuskan dan akan dijalankan oleh ASEAN. Dengan demikian organisasi masyarakat sipil, baik itu LSM, akademisi, lembaga-lembaga, ataupun *think tanks* mesti berperan serta dalam mengarahkan dan mengawasi perkembangan ASEAN ke depan.

Sekali lagi, perkenankanlah saya sebagai Wakil Indonesia untuk **ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)**, untuk menyampaikan sekali lagi apresiasi saya kepada pihak penyelenggara yang telah memberikan perhatian besar terhadap bagaimana kita dapat mengarus-utamakan HAM dalam pilar ASCC. Semoga pertemuan hari ini dapat memberikan pemahaman yang baik dan bekal yang berguna bagi hadirin dan rekan-rekan sekalian.

Terima kasih.
